

**PERILAKU TIDAK MEMILIH DALAM PEMILIHAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014 (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota)**

By: Sri Wulandari
Sriwulandarii94@yahoo.com
Supervisor: Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si
Library of Riau University

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km.12,5 Simpang Baru – Pekanbaru 28293
Telp. Fax. 076163277

Abstract

Behavior does not choose a conscious decision by someone to not use its voting rights by not attending the polling stations on the implementation of the general election. This study examines the behavior is not picking on people in the District of Pekanbaru City election of the President and Vice President in 2014. The authors are keen to do this research, because in democratic countries, elections or election of President and Vice President is an instrument of the implementation of democracy, but Pekanbaru City Subdistrict Subdistrict society many do not exercise their voting rights in the implementation of the democratic party. The research problems are "why some people do not participate in the election of President and Vice President in 2014?" This study aims to determine the reasons that dominate the public District of Pekanbaru City who do not exercise their voting rights by using three categories of reasons behavior did not choose that reason technical, political reasons and ideological reasons. This type of research is descriptive quantitative method with a sample of 100 people Pekanbaru Kota sub-district, and data collection techniques that do are questionnaires, interviews and documentation enclosed.

The results of this study, that the reason for not selecting the most dominating are technical reasons such as work, pain, and out of town, which is about 57%. Of these three indicators, the reasons prefer to work rather than come to the polls to choose the highest reason in the category of technical reasons, This is because the majority of respondents work as traders that are more concerned with economic interests rather than participate in political activities. Another is political and ideological reasons.

Keywords: *Non voting behavior, President and Vice President*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem demokrasi. Salah satu bentuk penyelenggaraan demokrasi di Indonesia adalah pemilihan umum. Pemilihan umum dikelompokkan dalam dua macam, yakni pemilihan perwakilan rakyat dan pemilihan Kepala Daerah ataupun Kepala Negara yang dalam penyelenggaraannya dijamin oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.¹ Di Indonesia pemilihan Kepala Negara lebih dikenal dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2014 di Indonesia merupakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ketiga kalinya yang dilaksanakan secara langsung.

Pengaturan mengenai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Pemilihan umum merupakan wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Dalam hal ini aspirasi rakyat merupakan ruh dalam pelaksanaan perkembangan dan pembangunan Indonesia ke depan. Tetapi dalam aplikasinya, pemilihan umum di Indonesia itu sendiri ditanggapi secara apatis oleh masyarakatnya sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

Secara umum pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Kota Pekanbaru tidak ada masalah yang signifikan karena tidak ditemukan gejala tertentu bahkan terbilang cukup damai dan aman. Meskipun secara umum pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 cukup kondusif, namun antusiasme masyarakat untuk hadir di tempat-tempat pemungutan suara merupakan sebuah tantangan. Hal tersebut dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dari data hasil rekapitulasi suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diperoleh dari KPU Kota Pekanbaru dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam memberikan hak suaranya yang paling rendah di Kota Pekanbaru yaitu Kecamatan Pekanbaru Kota.

¹ UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

² UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

Berdasarkan hasil rekapitulasi data Pilpres tahun 2014 yang penulis dapat dari KPU Kota Pekanbaru, menunjukkan bahwa dari 12 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, jumlah tidak memilih tertinggi terdapat di Kecamatan Pekanbaru Kota dengan jumlah sebanyak 10.671 atau 48,33%.

Banyaknya jumlah masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota yang tidak memilih menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi politik masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.

PERUMUSAN MASALAH

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Mengapa sejumlah masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota tidak berpartisipasi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014?

TINJAUAN PUSTAKA

Perilaku Tidak Memilih

Muhammad Asfar mengemukakan faktor yang menyebabkan *non-voting* atau golongan putih, diantaranya (i). Faktor psikologis, yang hadir dalam kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tidak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan semacamnya; (ii).

Sistem politik yang dianut sebuah negara, karena pada umumnya ada pengaruh positif antar tingkat demokrasi sebuah negara dengan ada tidaknya pemilihan umum di negara tersebut, disamping proses pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri; (iii). Kepercayaan politik, dimana variabel kepercayaan dapat menjelaskan keaktifan/ketidaktifan dan (iv). Latar belakang sosial ekonomi (tingkat pendidikan, pekerjaan dan tingkat pendapatan), dimana kasus di beberapa negara. Keempat indikator utama ini sering menjadi penentu hadir tidaknya seseorang dalam sebuah pemilihan umum³.

Menurut Eep Saefullah dalam Efriza perilaku tidak memilih terpilah ke dalam tiga kategori besar, antara lain⁴:

1) Alasan teknis

Alasan teknis ini dijelaskan ke dalam beberapa kelompok seperti di bawah ini:

- a) Pemilih yang berhalangan hadir karena ketiduran seusai bergadang semalaman sehingga kehilangan kesempatan mencoblos.

³ Arif Sugiono, 2013, *Strategic Political Marketing: Strategi Memenangkan Setiap Pemilu (Pemilukada, Pilpres, Pemilihan Legislatif DPRD, DPR-RI, DPD) Dengan Menempatkan Pemilih Sebagai Penentu Kemenangan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, hlm 146

⁴Efriza. *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. ALFABETA. Bandung. 2012. Hlm 546

Selain itu absen di tempat pemungutan suara karena kelelahan, sakit atau harus mengurus jenazah dan memakamkan kerabatnya.

- b) Pemilik suara tidak sah karena keliru mencoblos akibat gagalnya sosialisasi atau minimnya pengetahuan pemilih.
- c) Pemilih yang kurang pengetahuan misalnya di pelosok daerah. Mereka yang tak tahu untuk apa pemilu diadakan dan untuk apa mereka memilih, kaitan pilihan dan kepentingan, bahkan tak tahu apa yang ia inginkan sehingga gamang dan tak mencoblos.
- d) Pemilik suara tidak dapat memilih karena tidak mendapat undangan dan tidak terdaftar sebagai pemilih (tidak masuk dalam daftar pemilih tetap) atau disengaja tidak diberikan undangan oleh pihak panitia walaupun sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap.

2) Alasan politis

Alasan politis ini terdiri atas beberapa kelompok, antara lain:

- a) Pemilih tidak memiliki pilihan dari salah satu kandidat karena tidak sesuai dengan harapannya sehingga dia tidak mau mencoblos.

- b) Pemilih tidak percaya formalisme sekalipun bersahabat dengan elitisme dan tak percaya formalisme sekaligus elitisme. Biasanya mereka anti terhadap hal-hal formal, seperti partai, pemilu, parlemen, dan pemerintah).
- c) Pemilih yang tidak mau memilih karena menganggap demokratisasi sebagai arena permainan elite menggunakan arena dan kendaraan formal. Mereka tidak percaya pemilu dan pilihan mereka membawa perubahan terhadap kehidupan mereka

3) Alasan ideologis

Alasan ini cenderung bersifat permanen. Alasan ideologis terbagi terdiri dari ideologis sayap kanan maupun sayap kiri. Masyarakat menganggap golput sebagai perwujudan keyakinan ideologis.

- a) Pada sayap kiri, mereka menolak berpartisipasi dalam pemilu sebagai konsekuensi dari penolakan atas demokrasi liberal. Masyarakat tidak percaya pada mekanisme demokrasi yang dianggap liberal, untuk itu mereka tidak mau terlibat di dalamnya.
- b) Pada sayap kanan, mereka berasal dari kalangan fundamentalisme agama terutama Islam. Mereka beranggapan demokrasi dan

pemilu bertentangan dengan syariat agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dengan format deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat, yang menjadi objek penelitian ini, berdasarkan apa yang terjadi. Penelitian dilakukan di Kecamatan Pekanbaru Kota.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 10.671 orang yang merupakan masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Sedangkan sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus Slovin, sehingga didapat 100 responden.

PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Tidak Memilih Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014

Pemilihan umum merupakan sarana pengalaman demokrasi. Dapat dikatakan tidak ada demokrasi tanpa pemilihan umum, dan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilihan

umum tersebut. Masyarakat diposisikan sebagai aktor penting dalam tatanan demokrasi, karena pada hakekatnya demokrasi berdasar pada logika persamaan dan gagasan bahwa Pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah.

Masyarakat merupakan bagian dalam partisipasi politik. Salah satu wujud nyata dari partisipasi politik masyarakat ialah pada saat pemilihan umum, dalam hal ini masyarakat memiliki peranan dalam pengambilan keputusan. Dalam pemilihan umum masyarakat memberikan hak pilihnya untuk menentukan siapa yang akan terpilih sebagai pemimpin, namun kesadaran masyarakat akan pentingnya ikut serta dalam partisipasi politik masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data hasil rekapitulasi Pilpres tahun 2014 yang menunjukkan bahwa dari 12 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, jumlah partisipasi terendah berada di Kecamatan Pekanbaru Kota.

Dalam memahami permasalahan yang muncul pada individu seputar alasan responden untuk tidak berpartisipasi atau tidak memilih dalam Pilpres tahun 2014 lalu, penulis membagi kondisi perilaku tidak memilih tersebut kedalam beberapa kategori, diantaranya adalah alasan teknis, alasan politis dan alasan ideologis yang penulis sajikan dibawah ini:

1) Alasan Teknis

Alasan teknis dalam penelitian ini adalah adanya kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilih. Seperti pada saat hari pencoblosan pemilih sedang sakit, pemilih sedang ada kegiatan yang lain serta berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi pemilih. Kondisi itulah yang secara teknis membuat pemilih tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.

Secara teknis, seseorang tidak menggunakan hak pilihnya terdiri dari lima indikator, seperti: karena sakit, bekerja, letak TPS yang tidak terjangkau, cuaca buruk, dan keluar kota.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penyebaran 100 kuesioner di Kecamatan Pekanbaru Kota bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan mayoritas bekerja sebagai pedagang, sehingga mereka memiliki ruang gerak yang cukup sempit untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik serta lebih mementingkan pekerjaannya karena beranggapan bahwa jika mereka tidak bekerja maka mereka tidak akan mendapatkan penghasilan. Sesuai dengan hasil tabulasi data, dari 100 responden terdapat 41 responden atau sekitar 41% yang menjawab tidak menggunakan hak pilihnya karena alasan teknis tersebut.

Alasan lain yang menyebabkan responden tidak

menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 lalu yaitu alasan keluar kota dengan jumlah 13% dan alasan teknis yang paling sedikit adalah alasan sakit yang berjumlah hanya 3% saja. Jadi, dari 100 responden yang menjawab tidak memilih karena alasan teknis sebanyak 57 responden atau 57%.

2) Alasan Politis

Indikator yang dijadikan sebagai parameter untuk mengetahui faktor-faktor atau alasan mengapa masyarakat yang ada di Kecamatan Pekanbaru Kota. lebih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, dapat dilihat dari: apatis, adanya anggapan bahwa pemilihan umum tidak membawa perubahan, tidak adanya sosialisasi tentang visi dan misi kandidat, dan masyarakat tidak memahami isi visi dan misi kandidat.

Pada faktor ini alasan yang paling banyak dipilih oleh responden untuk tidak menggunakan hak pilihnya karena adanya anggapan mereka bahwa Pilpres yang ada tidak akan membawa perubahan yang berarti, yaitu sebanyak 23 orang atau sekitar 23% dari 100 responden yang ada.

Sedangkan 2 responden lainnya beralasan bahwa tidak ada pilihan kandidat yang sesuai dengan kriteria mereka dan harapan mereka. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari 100 responden yang menjawab tidak memilih karena alasan politis yaitu sebanyak 25 responden atau 25%.

3) Alasan Ideologis

Indikator yang dijadikan sebagai parameter untuk mengetahui alasan-alasan masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum, adalah: tidak percaya pada mekanisme, bertentangan dengan unsur keagamaan, dan adanya perbedaan pandangan.

Faktor ideologi ditujukan bagi mereka yang tidak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tidak mau terlibat didalamnya entah karena alasan nilai-nilai agama atau perbedaan pandangan. Menurut hasil analisis data terhadap jawaban kuesioner pada 100 responden diperoleh faktor yang paling banyak menyebabkan seseorang tidak menggunakan hak pilihnya adalah karena tidak mau terlibat dalam pemilihan umum karena bertentangan dengan unsur keagamaan sebanyak 11%.

Alasan lain yang menyebabkan responden tidak memilih yaitu karena alasan masyarakat tidak percaya dengan mekanisme atau sistem penyelenggaraan pemilihan yang digunakan, yaitu sebesar 7%. Dapat disimpulkan bahwa dari 100 responden yang menjawab tidak memilih karena alasan ideologis sebanyak 18 responden atau 18%.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan mengenai perilaku tidak memilih pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Alasan masyarakat memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya adalah karena alasan bekerja, sakit, keluar kota, tidak ada pilihan kandidat yang sesuai kriteria, adanya anggapan bahwa Pilpres tidak akan membawa perubahan, adanya perbedaan pandangan dengan para kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014 sehingga masyarakat tidak ingin terlibat didalamnya, dan masyarakat atau pemilih pada umumnya tidak percaya terhadap mekanisme pemilihan umum.
- 2) Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota lebih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, karena beberapa faktor, seperti faktor alasan teknis, alasan politis, dan alasan ideologi. Faktor yang paling menyebabkan masyarakat memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, karena alasan teknis sebesar 57% atau sekitar 57 responden. Urutan kedua

adalah faktor politis sebesar 25 % atau sekitar 25 responden. dan urutan ketiga adalah faktor ideologi sebesar 18 % atau 18 responden.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat membuat saran sebagai berikut ini:

- 1) Bagi penelitian selanjutnya, supaya ada penelitian serupa yang bermaksud menguji statistik di Kecamatan Pekanbaru Kota. Selain itu direkomendasikan juga untuk penelitian bagaimana cara yang efektif untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dari latar belakang sosiokultural yang berbeda.
- 2) Pada saat menjelang Pilpres, pihak Kecamatan harus mengkoordinasi kembali dari masing-masing TPS untuk mengajak masyarakat betapa pentingnya berpartisipasi politik.
- 3) Seharusnya pejabat publik harus menepati janji-janji politiknya, sehingga masyarakat pun percaya akan politik dalam hal memilih salah satu pejabat yang diyakini dapat mengubah nasib bangsa Indonesia secara umum, dan harapan bangsa Indonesia pun akan terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.Ubaedillah dan Abdul Razak. 2010. *Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah
- Badgong, Robert C and Biklen, Sari Knopp, 1982. *Qualitative Research for Education: An Introduction to theory and methods*, Bacon: Allyn and Bacon
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Burhan, Bungin. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta, Kencana.
- Efriza. 2012. *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: ALFABETA
- Fadjar, Mukthie. 2013. *Pemilu dan Demokrasi*. Jawa Timur: Setara Press
- Firmanzah. 2007. *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Hairus, Salim, dkk. 2004. *Islam dan Pemilu*. Yogyakarta: Yayasan

- Lembaga Kajian Islam dan Sosial
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga
- Istianto, Bambang. 2011. *Demokratisasi Birokrasi*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Kristiadi. 2004. *Politik Pasca Pemilu 2004 dan Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Samuel P. Huntington dan Joan Nelson. 1990. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Press
- Setiaji. 2011. *Orientasi Politik Yang Mempengaruhi Pemilih Pemula Dalam Menggunakan Hak Pilihnya*. Semarang: Integralistik
- Sofian Effendi dan Tukiran. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES
- Sugiarto, Eko. 2013. *Master EYD Edisi Baru*. Yogyakarta: Suaka Media
- Sugiono, Arif, 2013. *Strategic Political Marketing : Strategi Memenangkan Setiap Pemilu (Pemilukada, Pilpres, Pemilihan Legislatif DPPRD, DPR-RI, DPD) Dengan Menempatkan Pemiliha Sebagai Penentu Kemenangan..* Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- , 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Jurnal :**
- Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol.1, No.1, 2011
- Skripsi :**
- Karnisa, Elsi. 2014. *Perilaku Tidak Memilih Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2012 Pada Kelurahan Tanjungpinang Kota*. Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang
- Oki. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pada Pemilihan Presiden Tahun 2009 Di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Universitas Riau

Nurdiana. 2015. *Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua Di Kecamatan Tenayan Raya (Studi Di Kelurahan Rejosari dan Kelurahan Kulim)*. Pekanbaru: Universitas Riau

Atiek Lestary. 2009. *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 (Studi Tentang Tingkat Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Di Kalangan Masyarakat Kabupaten Puwerejo)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Sumber Lain:

KPU Kota Pekanbaru

Arbi Sanit, <http://www.kompas.com> (diakses tanggal 21 September 2016)

Joseph Schumpeter, <http://www.kompas.com> (diakses tanggal 21 September 2016)

<http://www.antarariau.com/berita.40125/-pilpres---partisipasi->

[pemilih-pilpres-pekanbaru-meningkat-dibanding-pileg \(diakses tanggal 13 Januari 2017\)](#)

<http://kpu-riaprov.go.id/images/stories/model%20cd%201%20pilpres%202014.pdf> (diakses tanggal 10 Oktober 2016)

<http://solider.or.id/2013/09/05/undang-g-undang-nomor-42-tahun-2008-tentang-pemilihan-umum-presiden-dan-wakil-presiden> (diakses tanggal 1 Februari 2016)

Regulerb.blogspot.co.id